



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

Senin, 20 September 2021
Edisi: 00226445/GBP/1x/2021

KLIPING

Berita Pertanian



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harsono RM. No 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Telp. (021) 7806 131 Ext. 2303, 2308, Email : humas-ip@pertanian.go.id
Website : www.pertanian.go.id

GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. HORTIKULTURA :
 - Bibit Jeruk bagi Petani Penyintas Banjir Kalsel (K)..... 1
2. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN :
 - Tuntaskan Neraca Komoditas Jagung (RM)..... 2
 - Subsidi Harga Jagung untuk Pakan Bisa Meringankan Beban Peternak Unggas (KN)..... 3
 - Kemendag Rancang Aturan Penyediaan Jagung (R)..... 4-5
 - “Kapan Nih Harga Jagung Turun, Kami Nggak Bisa Nunggu Lama” (RM)..... 6-7
 - Jalan Keluar Polemik Pakan (BI)..... 8-10
 - Emiten Soroti Moratorium Sawit (BI)..... 11
 - Politik-Ekonomi Perunggasan (BI)..... 28-29
3. PERKEBUNAN :
 - Masa Berlaku Moratorium Izin Kebun Sawit Berakhir (KN)..... 12
 - Semester II-2021 Ekspor Sawit Lebih Baik (ID)..... 13
 - BUMN Kejar Swasembada Gula (R)..... 14-15
 - Menteri Erick Berharap RI Swasembada Gula pada 2025 (ID)..... 16-17
 - Intensifikasi Kebun Sawit Rakyat (KN)..... 30-31
4. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN :
 - Alsintan Bikin Petani Semangat Berproduksi (RM)..... 18
 - Gobel Salurkan Bantuan Pupuk di Madiun; Sulawesi Selatan Terus Membangun Bendungan (ID;MI)..... 19
5. KETAHANAN PANGAN :
 - Petani Kalteng Beralih ke Sawit dan Karet (K)..... 20
6. PERTANIAN UMUM :
 - Realisasi Serapan Anggaran Kementerian Pertanian (ID)..... 21
 - RI Butuh Investasi Pertanian (R)..... 22
 - Dalam Pertemuan G20, Indonesia Dukung Pertanian Afrika Capai Target SDGs (K)..... 23-24
 - Indonesia Dukung Pertanian Afrika Capai Target SDG's (MI)..... 25-27

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☒ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL	20/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN	11 / 1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI	☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya		☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan		☐ Opini/Artikel
☒ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post		☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika			☐ Pojok/Karikatur

Bibit Jeruk bagi Petani Penyintas Banjir Kalsel

MARTAPURA — Bantuan bibit jeruk siam banjar mulai dibagikan kepada petani jeruk di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bibit itu sebagai pengganti tanaman yang mati akibat banjir besar pada awal 2021. Pada tahap awal, petani jeruk di Desa Lok Baintan dan Desa Sungai Pinang masing-masing dibantu dengan 1.000 bibit jeruk. "Bantuan bibit jeruk di desa lain akan menyusul," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel Syamsir Rahman di Banjarmasin, Minggu (19/9/2021). Jeruk merupakan salah satu komoditas andalan petani di Banjar dan Barito Kuala. Mereka menanam jeruk selain menanam padi dan tanaman hortikultura lain. Banjir besar Kalsel awal tahun ini merusak lahan pertanian dan perkebunan. Di Banjar dan Barito Kuala, sentra jeruk di Kalsel, tanaman jeruk yang mati akibat banjir hampir 100.000 pohon. (JUM)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/05/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Pesan Buat Kemendag-Kementan Tuntaskan Neraca Komoditas Jagung



Darmadi Duriyanto

SENAYAN menyoroti gejala harga jagung yang membuat para peternak menjerit. Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta segera duduk bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) menyelesaikan persoalan ini.

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Duriyanto mengatakan, salah satu hal yang perlu diselesaikan dua kementerian ini adalah data neraca perdagangan jagung yang sampai saat ini tak kunjung tuntas.

"Kami meminta kedua kementerian ini (Kemendag dan Kementan) masing-masing menghilangkan ego sektoral. Ayo bekerja sama, saling bahu-membahu memikirkan nasib peternak dan petani," tegasnya.

Dijelaskan Darmadi, Presiden Joko Widodo telah membentuk Badan Pangan Nasional (BPN). Salah satu tugasnya, konsen mengurus masalah

jagung ini.

Namun, struktur badan ini belum terbentuk. Yang ditunjuk memimpin badan baru ini pun sampai saat ini belum ada. Aturan turunan Perpres 66 Tahun 2021 mengenai BPN ini pun harus dibahas lebih lanjut antara Kemendag, Kementan, dan Kementerian BUMN.

"Sementara nasib petani dan peternak yang jangka pendek ini, tidak bisa menunggu. Mereka (peternak) merugi, harga telur jatuh. Harga pakan-nya (jagung) tinggi, sehingga peternaknya menjerit," jelas politisi daerah pemilihan DKI Jakarta ini.

Di satu sisi, lanjutnya, Kementan mengklaim, ada over produksi jagung. Sementara Kemendag mengatakan, stok jagung stok jagung saat ini kurang. Perbedaan data dua institusi ini harus segera diselesaikan agar tidak terus menjadi persoalan. RM-7

"Masalahnya di mana, apakah di tata niaga atau ada stok yang ditahan oleh tengkulak besar. Semua itu harus diverifikasi. Bagaimana bisa diverifikasi sementara neraca komoditasnya tidak ada," katanya.

Untuk itu, Darmadi meminta, perbedaan data di tiap kementerian ini harus bisa disinkronisasi dan diharmonisasi. Ini sebagai solusi jangka pendek bagi kelangsungan hidup para petani, maupun peternak, sebelum perpres neraca komoditas keluar. "Segera eksekusi (data neraca komoditas), jangan hanya diskusi," tambah dia. ■ KAL

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 28/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☒ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

■ EMITEN UNGGAS

Subsidi Harga Jagung untuk Pakan Bisa Meringankan Beban Peternak Unggas

JAKARTA. Pemerintah menyiapkan skema untuk menekan harga jagung pakan ternak. Diharapkan dengan skema subsidi tersebut, harga jagung dapat ditekan menjadi sekitar Rp 4.500 per kilogram (kg) di tingkat peternak.

CEO PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) Ali Mas'adi mengapresiasi langkah pemerintah dalam upayanya menekan harga jagung ini. Sebab, jagung merupakan salah satu bahan baku penting dalam ternak unggas.

"Namun langkah ini juga tentu akan ditinjau agar keberpihakan pemerintah tidak hanya kepada para pelaku usaha industri unggas, namun juga harus dapat berpihak kepada para petani jagung," jelas Ali, Jumat (17/9).

Asal tahu saja, sebelumnya Ketua Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosgiarso menyebutkan, saat ini harga jual jagung di pasaran masih mencapai Rp 6.000 per kilogram. Kondisi ini menurutnya merugikan para peternak unggas, khususnya ayam petelur.

Sementara Ali mengungkapkan, berdasarkan data yang dimilikinya, saat ini rata-rata harga jual pakan ternak telah mencapai Rp 8.000 per kg. Dia menjelaskan, seluruh *support* jagung di Tanah Air masih berasal dari dalam negeri dan belum ada impor.

WMUU yang model bisnisnya fokus pada *downstream*, dengan produk berupa karkas ayam, *boneless* dan *chicken parting*, proses produksinya

Pemulihan ekonomi dapat mendorong kinerja peternak.

yang paling besar justru terjadi di fasilitas Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang dimiliki. "Tentu dengan penekanan harga jagung oleh pemerintah akan membantu aktivitas di divisi *farm* kami. Namun, dengan kontribusi terbesar kami berasal dari aktivitas produksi di RPHU, fenomena ini tidak berdampak signifikan bagi kinerja perusahaan," ungkap Ali.

Dengan demikian, WMUU masih optimistis bisa mencapai target pertumbuhan penjualan sampai 300% untuk tahun ini. Tahun lalu, WMUU mencatatkan pendapatan sebesar Rp 1,3 triliun.

Analisis Erdhika Elit Sekuritas Ivan Kasulthan menilai, langkah pemerintah cukup memberikan keuntungan bagi sektor *poultry*, karena akan mengurangi beban pakan ternak. Ini juga akan memberikan *multiplier effect* terhadap pendapatan emiten.

Ivan melihat, prospek sektor *poultry* tergantung dari perkembangan ekonomi di tengah pandemi covid-19. Ekonomi yang mulai pulih diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, se-

hingga dapat berdampak positif bagi sektor *poultry* ini.

Analisis Ciptadana Sekuritas Asia Fahressi Fahalmesta menilai, sebetulnya harga jagung dan bungkil kedelai tidak lagi menjadi isu yang hangat. Pihaknya menilai harga jagung di Indonesia berpotensi turun pada 21 Oktober.

Dari dalam negeri, pemerintah telah melonggarkan penerapan PPKM. Menurut Fahressi, seiring penyesuaian PPKM, permintaan unggas domestik juga akan pulih.

Menilik tahun-tahun sebelumnya, menjelang akhir tahun harga ayam biasanya naik. "Kami memperkirakan kinerja keuangan integrator unggas di kuartal III-2021 dan kuartal IV-2021 lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," papar Fahressi.

Hanya saja, ia memperkirakan erosi margin paling mungkin terjadi di kuartal III-2021 dibandingkan dengan kuartal II-2021. Meskipun demikian, Fahressi menilai pasar telah memperhitungkan kondisi tersebut. "Kami tetap mempertahankan rekomendasi netral pada sektor perunggasan Indonesia," ujar dia.

Fahressi merekomendasikan *hold* CPIN dengan target Rp 6.300, beli JPFA dengan target harga Rp 2.500, dan MAIN dengan target Rp 990.

Sementara Ivan merekomendasikan *buy on weakness* untuk MAIN dengan target harga Rp 835-Rp 855, *specula-*

Unggas

tive buy untuk CPIN dengan target harga Rp 6.900-Rp 7.300, *speculative buy* WMUU dengan target harga Rp 180-Rp 190, dan *wait and see* untuk saham SIPD.

Sugeng Adji Soenarso

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Kemendag Rancang Aturan Penyediaan Jagung

Perusahaan besar diminta tidak menjual ayam hidup di pasar bebas.

■ DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyiapkan regulasi pendukung untuk penyediaan jagung pakan murah bagi peternak. Kemendag bersama sejumlah kementerian terkait juga segera membahas penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menetapkan besaran jagung yang akan disiapkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, regulasi dari Kemendag ditargetkan selesai pada pekan ini. "Regulasi ini untuk mengatur mekanisme selisih margin karena (BUMN) diharuskan memasok jagung ke peternak rakyat dengan harga sesuai acuan Rp 4.500 per kilogram," kata Oke kepada *Republika*, Ahad (19/9). **R-10**

Oke menjelaskan, regulasi Kemendag tidak berfokus terhadap penugasan kepada BUMN. Dia mengatakan, beleid tersebut akan mengatur pemanfaatan cadangan stabilisasi harga pangan (CSHP) sebagai pengganti biaya pengadaan jagung.

Dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan perwakilan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) salah satunya disepakati pemerintah akan menyiapkan jagung dengan harga

Rp 4.500 per kg. Hal itu karena rata-rata harga jagung melonjak hingga Rp 6.000 per kg.

Sementara itu, Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Ismail Wahab belum dapat menjelaskan lebih detail mengenai penyediaan jagung untuk peternak. Dia mengatakan, Kementan masih dalam proses penyelesaian kebijakan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan bersama Pinsar.

Para peternak menanti realisasi janji pemerintah untuk menyiapkan jagung pakan ternak unggas dengan harga terjangkau. Ketua Umum Pinsar Singgih Januratomoko mengatakan, pada pertemuan yang digelar pekan lalu, pihaknya menyampaikan langsung kepada presiden agar peternak bisa mendapatkan jagung dengan harga Rp 4.500 per kg. Menurut Singgih, Presiden Joko Widodo menyetujui permintaan tersebut dan akan ditindaklanjuti melalui kementerian teknis, yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

"Jagung yang paling mendesak. Usulan Menteri Perdagangan akan memberikan subsidi jagung sebanyak 30 ribu ton hingga akhir Desember sehingga harga jagung yang diterima peternak bisa Rp 4.500 per kg. Ini dalam jangka waktu sepekan kita tunggu saja barangnya ada atau

tidak," kata Singgih.

Singgih mengungkapkan, pihaknya juga mengusulkan opsi impor jagung untuk kebutuhan stabilisasi harga di dalam negeri. Dia menekankan, harga jagung pakan saat ini telah menambah beban para peternak unggas.

"Saya usulkan ini (impor) walaupun tidak populer, tapi presiden setuju selama untuk stabilisasi, tapi kalau bisa memang (lebih baik) tidak impor," katanya.

Lebih lanjut, Singgih menuturkan, Pinsar juga meminta pemerintah agar membuat sistem cadangan jagung pemerintah seperti komoditas beras. Setidaknya, cadangan jagung harus tersedia 500 ribu ton setiap bulannya agar harga jagung dalam negeri tetap stabil dan peternak rakyat mendapatkan kestabilan harga pakan.

Menurut dia, pemerintah juga



Usulan Menteri Perdagangan akan memberikan subsidi jagung sebanyak 30 ribu ton hingga akhir Desember.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 15 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

menyetujui usulan tersebut dan akan menyiapkannya lewat penguasaan terhadap BUMN. Berkaca dari situasi industri perunggasan rakyat yang kerap mengalami fluktuasi harga diperlukan adanya regulasi setingkat keputusan presiden untuk melindungi peternak. Sebab, selama ini peternak kecil selalu bersaing dengan perusahaan besar di pasar bebas.

Peternak berharap, agar ada pengaturan impor *grand parent stock* (GPS) atau indukan ayam secara merata dan adil sehingga dominasi perusahaan besar tidak terlalu besar. Perusahaan besar juga diminta untuk tidak menjual ayam hidup atau ayam tanpa bulu di pasar bebas.

"Itu yang kita usulkan dan disetujui semua oleh presiden. Jadi, ada yang jangka pendek untuk jangka, lalu menengah, dan panjang. Presiden juga sudah perintahkan Kemendag dan Kementan untuk membuat aturan mengenai itu," kata Singgih.

Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) juga menyarankan pemerintah agar menerbitkan aturan khusus terkait perlindungan terhadap komoditas strategis di sektor peternakan. Hal itu karena komoditas daging ayam serta telur ayam ras kerap mengalami fluktuasi harga yang merugikan peternak. Ketua Pataka, Ali Usman, menuturkan, peternak rakyat baik peternak broiler maupun layer belakangan ini berguguran akibat persaingan usaha yang tidak sehat.

■ ed: ahmad fikri noor

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

PULANG DARI ISTANA, SUROTO DIGERUDUK EMAK-EMAK "Kapan Nih Harga Jagung Turun, Kami Nggak Bisa Nunggu Lama"

MASIH ingat dengan Suroto, seorang peternak ayam petelur asal Blitar yang sempat viral karena nekat membenarkan poster dan dipanggil Presiden Jokowi ke Istana? Kemarin, sepulang dari Istana, Suroto digeruduk emak-emak tetangganya. Kepada Suroto, mereka menayakan "Kapan nih harga jagung turun, kami nggak bisa nunggu lama".

RM/19/9/1
Rabu (15/9), Suroto bersama sejumlah asosiasi peternak telur diundang Jokowi ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Kepala negara, ingin mendengar langsung keluhan dari para peternak ayam petelur tentang masalah yang dihadapi. Dalam pertemuan itu, Jokowi berjanji akan menurunkan harga jagung yang merupakan pakan dari ternak dalam waktu dekat.

Pertemuan Suroto dengan Jokowi ini kemudian langsung viral. Apalagi, foto Jokowi dan Suroto ikut diunggah di akun media sosial milik Sekretariat Negara. Kemudian diupload ulang oleh petinggi di lingkaran Istana. Salah satunya, lewat akun medsos milik Juru Bicara Kepresidenan, Fadjoel Rachman.

Suroto yang tenar paska pertemuan itu, mengundang penasaran banyak orang. Puncaknya, Suroto digeruduk emak-emak yang tergabung dalam peternak ayam petelur se-Kota Blitar, Jawa Timur. Para emak-emak ini menyambangi langsung kediaman Suroto di Desa Suruhwadang, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, siang kemarin.

Tujuan kedatangan emak-emak ini, untuk menanyakan hasil pertemuan Suroto dengan Jokowi di Istana. "Ka-

pan harga nih harga jagung turun? Kami nggak bisa nunggu lama lagi," tanya emak-emak pada Suroto. Video geruduk emak-emak ke Suroto ini kemudian viral di media sosial.

Menurut mereka, saat ini harga jagung justru naik setelah pertemuan tersebut. Sambil bertolak pinggang, salah satu emak-emak berbaju hijau berbicara dengan bahasa Jawa. Nadanya agak tinggi.

"Niki lho pak. Aku wis ora iso ambegan. Mosok tuku jagung saiki Rp 6.200. Janjine Pak Jokowi ki piye? (Ini lho Pak Pak saya sudah tidak bisa bernapas. Masak beli jagung Rp 6.200. Janjinya Pak Jokowi itu bagaimana?)" tanya dia.

Sambil menenangkan, Suroto coba menjelaskan hasil pertemuannya dengan Jokowi.

"Kata Pak Presiden sudah jelas jagung yang dijanjikan akan datang dalam minggu-minggu ini. Dados sabar mawon (jadi sabar saja)," pesannya.

"Sabar sampai kapan," sambar salah satu emak-emak kepada Suroto.

Ia bercerita, pertemuan di Istana membuatnya gugup. Karena bukan hanya ada presiden, tetapi juga ada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Suroto ingat, saat itu Jokowi meminta kedua menteri itu mencari solusi agar harga jagung untuk peternak Rp 4.500 per kilogram (kg). Mentan mengaku siap menyediakan 30 ribu ton jagung.

Mendag kemudian berhitung untuk mensubsidi jagung. Hasilnya, Rp 45 miliar pun akan disiapkan. Jagung dengan harga Rp 4.500 per kg, di-

janjikan akan direalisasikan pekan ini. Namun janji itu tak kunjung tiba.

Kata Suroto, sekitar 3 tahun lalu, Kementan menginisiasi kerja sama langsung antara petani jagung dengan para peternak layer. Instrumennya, peternak layer Blitar langsung mengambil panen jagung dari lahan petani di wilayah Blitar. Namun, kerja sama itu tidak berjalan sesuai harapan.

Aksi emak-emak ini mendapat perhatian para wakil rakyat di Senayan Jakarta. Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan menilai, aksi ini sebagai jeritan ranyat kecil yang tengah memperjuangkan harapan mereka agar lebih baik.

Daniel meminta aspirasi emak-emak itu segera direspons pemerintah, dalam hal ini pembantu presiden. Terlebih, Jokowi sudah meminta harga jagung untuk ternak diturunkan. Sehingga perlu solusi jangka pendek untuk memangkas biaya ternak.

"Masalah pakan ini menjadi persoalan bagi peternak. Karena 70 persen biaya produksi ada pada pakan. Solusi jangka pendek memang menurunkan bahan baku pakan seperti jagung, tetapi harus dihitung secara matang agar petani jagung juga tetap untung," pinta Daniel.

Ia mengimbau agar pemerintah membongkar penyebab harga pakan yang masih mahal, dan memperbaiki rantai pasoknya. Sebab, menurutnya, hal ini menyangkut kedaulatan pangan nasional dan perlindungan peternak.

"Apalagi di tengah-tengah Indonesia kalah dengan Brasil di WTO karena urusan ayam ini sangat mengancam nasib peternak dan petani jagung

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 19/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☒ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

Indonesia. Harus dibongkar mengapa kita kalah efisien dengan Brasil," usul politikus PKB ini.

Anggota Komisi IV DPR, Ono Surono menilai perlu langkah cepat dari pemerintah terkait hal ini. Dia juga mengatakan perlunya mengkaji ulang program upaya khusus produksi jagung. Karena sebelumnya, Mentan pernah bilang sudah bisa mengekspor jagung dan mengurangi impor.

"Artinya, program yang dibuat oleh Mentan bukan semata program yang hanya menyenangkan presiden dan rakyat sesaat. Tetapi harus menjadi program yang berkelanjutan. Bagi peternak skala kecil, kebutuhan jagung masih sangat besar, di saat pakan pabrik harganya juga sangat tinggi," kata Ono.

Kader banteng ini lantas meminta Jokowi menjalankan Badan Pangan Nasional. Fungsinya untuk koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta kerawanan pangan.

"Sehingga tidak ada lagi ketidaksinkronan antara Mentan dan Mendag terkait masalah pangan," ujarnya. ■ MEN

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/7/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

JALAN KELUAR POLEMIK PAKAN

Lucky Leonard Leatemia
lucky.leonard@bisnis.com

Solusi pemerintah atas gejolak harga pakan jenis jagung yang berlangsung hingga saat ini sangat dinantikan para pelaku usaha perunggasan, khususnya para peternak mandiri. Kebijakan pemerintah diharapkan menjadi jalan keluar dari benang kusut polemik pakan.

Para pelaku usaha perunggasan mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan janjinya mengucurkan subsidi jagung sebagai bahan pakan ayam di sejumlah sentra peternakan. Beberapa di antara sentra tersebut tersebar di Blitar, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Lampung.

Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Singgih Januratomoko mengatakan selama ini pengusaha perunggasan mengeluhkan ketimpangan yang terjadi di pasaran. Kala harga pakan merangkak naik, harga telur justru kian merosot sehingga memberikan tekanan ganda bagi peternak.

"Informasinya, Kementerian Perdagangan dananya sudah siap. Hanya saja, Kementerian Pertanian [untuk] barangnya [jagung] masih belum tahu ada atau tidak," kata Singgih kepada *Bisnis*, Minggu (19/9).

Ihwal rencana subsidi itu, Kemen-

terian Perdagangan (Kemendag) telah menyiapkan anggaran Rp45

miliar untuk pengadaan 30.000 ton jagung dengan harga Rp1.500 per kilogram kepada peternak di sejumlah sentra produksi.

"Target Presiden satu minggu segera eksekusi. Ini Blitar belum menerima, apalagi Lampung dan Klaten," ungkap Singgih.

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi mengatakan harga jagung yang tinggi menjadi masalah mendasar. Menurutnya, harga komoditas yang menjadi bahan utama pakan itu harus wajar di tingkat peternak.

"Kementan dan Kemendag harus segera mencari jalan keluar agar usaha peternakan ini bisa dinikmati oleh pelakunya," tegas Sugeng.

Pihaknya pun saat ini masih menantikan realisasi atas solusi yang diutarakan pemerintah untuk mengatasi gejolak harga pakan tersebut.

Adapun, pemerintah telah merumuskan solusi gejolak harga pakan yang telah menekan para peternak mandiri tersebut. Salah satunya adalah dengan mengikat rantai distribusi jagung antarsentra produksi.

Menteri Pertanian Syahrul

Yasin Limpo mengatakan strategi tersebut akan mulai dieksekusi pada pekan ini agar kebutuhan jagung pakan, khusus-

nya di Klaten, Blitar, dan Lampung, bisa terpenuhi dengan harga yang relatif stabil. "Kalau perlu, [kami akan] menggunakan subsidi-subsidi tertentu," ujarnya.

Selain itu, Syahrul berjanji akan menambah lebih banyak sentra pakan khusus jagung di daerah yang memiliki basis peternakan. Pemerintah juga akan melakukan penjagaan dan stabilitas harga agar tetap terkendali serta memperbaiki regulasi dan aturan yang bisa melindungi peternak.

TIDAK IMBANG

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui saat ini terjadi ketidakseimbangan dalam industri perunggasan. Salah satunya adalah akibat kenaikan harga jagung dan gandum sebagai pakan ternak utama.

"Ini menyebabkan ongkos produksi peternak layer dan broiler menjadi sangat tinggi," tutur Lutfi, pekan lalu.

Dengan demikian, imbuahnya, pemerintah bakal memastikan keterjangkauan harga serta memastikan fungsi daging dan telur dalam keadaan baik.

Bustanul Arifin, ekonom

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 20/9/2021
☒ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

pertanian sekaligus Guru Besar Pertanian Universitas Lampung mengatakan ketiadaan stok cadangan nasional menjadi

masalah krusial yang menyebabkan instabilitas harga dan pasokan yang berkepanjangan.

"Harga pakan terlalu tinggi karena di dalam negeri [stok] berkurang, dari luar negeri juga kurang," ujarnya kepada *Bisnis*.

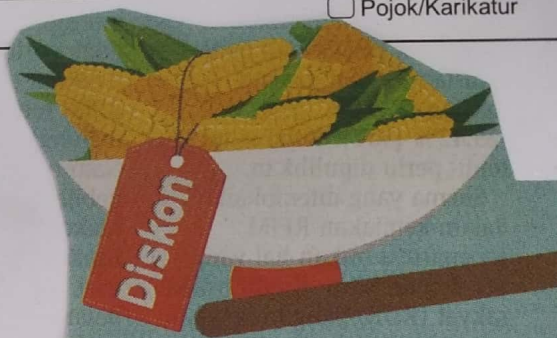
Untuk mengurai masalah ini dalam jangka pendek, lanjut Bustanul, pemerintah dapat berkoordinasi dengan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) untuk membagi kelebihan stok yang dimiliki.

Selebihnya, Bustanul mengapresiasi upaya Kementan dengan program intervensi cadangan yang menyambungkan pemerintah daerah yang surplus jagung dengan yang defisit kendati jumlahnya tidak signifikan untuk menstabilkan harga.

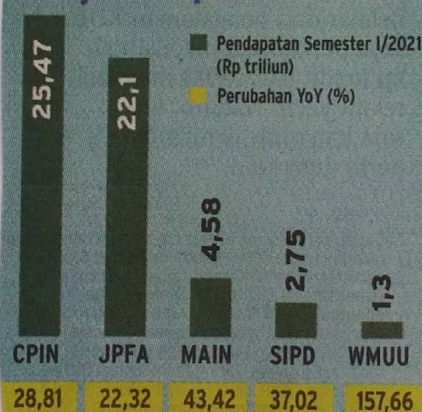
Sementara itu, Kepala Riset Praus Kapital Alfred Nalnggolan menjelaskan lonjakan harga jagung akan berimbas cukup signifikan secara langsung terhadap harga produk unggas.

Dia mengatakan emiten unggas seperti PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) yang ingin mempertahankan margin akan menaikkan harga produknya seiring dengan lonjakan harga jagung. (Nyoman Ary

Wahyudi/Reni Lestari/Lorenzo A. Mahadhika)



Kinerja Pendapatan dan Laba Emiten Pakan Ternak dan Unggas



Kode Saham	Lab a (Rugi) Bersih Semester I/2021 (Rp miliar)	Perubahan YoY
CPIN	2.832,99	73,01%
JPFA	1.647,92*	426,29%
WMUU	88,38	181,29%
MAIN	128,6	berbalik laba
SIPD	-15,79	berbalik rugi

*) laba periode berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung



Kinerja Saham Emiten Pakan Ternak dan Unggas

	Harga Saham (Rp)	Kinerja Saham YTD (%)
CPIN	6.750	1.935
JPFA	815	1.850
MAIN	175	3,45
SIPD	32,08	10,14
WMUU	23,33	-2,78

Sumber: Laporan Keuangan, Bloomberg, diolah.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |



Rata-Rata Harga Pakan, DOC, HPP, dan Livebird (Rp)

Periode (2021)	Pakan	DOC	HPP	Livebird
31 Mei-6 Juni	7.948	5.440	19.010	18.725
7-13 Juni	7.961	6.248	19.570	20.342
14-20 Juni	7.961	6.904	20.007	19.459
21-27 Juni	7.961	6.915	20.014	17.082
28 Juni-4 Juli	7.961	4.820	19.455	14.891
4-11 Juli	7.961	6.076	18.618	16.058
12-18 Juli	7.961	4.439	18.364	13.799
19-25 Juli	7.961	3.650	17.838	13.425
26 Juli-1 Agustus	7.961	4.583	18.460	12.995

Keterangan: DOC: Day old chick, HPP: Harga pokok produksi

Sumber: Gozan

BUSNIS SINTA NOYIZAH

3

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 20/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

| PEMBUKAAN LAHAN |

Emiten Soroti Moratorium Sawit

Bisnis, JAKARTA — Sejumlah emiten perkebunan angka bicara soal kebijakan moratorium izin pembukaan lahan sawit baru. Aturan ini resmi berakhir per 19 September 2021 meski pemerintah belum menyampaikan pengumuman resmi.

Investor Relation Manager PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) Fenny A. Sofyan berujar pihaknya akan mematuhi keputusan pemerintah. Dia menilai, pemberlakuan kebijakan moratorium ini memang untuk kebaikan industri sawit negara.

"Apa yang dilakukan pemerintah saat ini tujuannya agar tata kelola sawitnya lebih baik dan produktivitas sawit yang semakin tinggi," katanya, akhir pekan lalu.

Jika moratorium dilanjutkan, Fenny menuturkan pemerintah perlu memperhatikan serapan sawit dalam negeri dan melanjutkan program mandatory biodiesel 30 atau B30.

Menurutnya, AALI tidak terlalu terdampak dari kebijakan moratorium ini sebab perseroan tidak berencana melakukan pembukaan lahan sawit baru dalam waktu dekat.

Selain itu, AALI juga telah mencanangkan kebijakan NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) sebagai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan sejak 2015. Kebijakan tersebut berarti AALI tidak akan membuka lahan sawit pada hutan-hutan atau di lahan gambut.

Meski demikian, dia mengatakan AALI tidak me-

nutup kemungkinan untuk akuisisi perusahaan atau perkebunan sawit yang baru. Sejauh ini, AALI memiliki aset area seluas 287.600 hektare yang seluruhnya telah dijadikan lahan penanaman sawit.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) Lucas Kurniawan menyebutkan, pihaknya mempercayai bahwa pemerintah telah melakukan analisis mengenai penerapan moratorium berdasarkan data serta masukan dari para pemangku kepentingan terkait.

Dia juga yakin pemerintah akan mengambil kebijakan terbaik yang memperhatikan kepentingan negara dan pemangku kepentingan secara luas. (Lorenzo Mahardhika)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☒ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 20/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 14 /
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☒ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

■ PERKEBUNAN SAWIT

Masa Berlaku Moratorium Izin Kebun Sawit Berakhir

JAKARTA. Masa berlaku Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit resmi berakhir pada Minggu (19/9) kemarin.

Pasalnya, beleid yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu diundangkan pada 19 September 2018 dan perlu dievaluasi paling lambat tiga tahun setelah berlaku. Dengan demikian, saat ini terjadi kekosongan hukum atas kebijakan moratorium perizinan perkebunan sawit.

Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah memperpanjang aturan moratorium perizinan dan pembukaan lahan sawit baru tersebut.

Direktur Eksekutif Sawit Watch Andi Inda Fatinaware meminta kepada Presiden Jokowi untuk memperpanjang beleid moratorium sawit.

Menurutnya, kebijakan moratorium sawit sebagai kebijakan yang baik dalam perbaikan tata kelola sawit di Indonesia. Moratorium ini juga

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sawit di kawasan hutan. *KW:ff*

Selain itu, perpanjangan moratorium juga dinilai akan berdampak pada mengatasi kebakaran hutan. "Kalau ada moratorium sawit, kebakaran hutan dan penebangan hutan besar-besaran bisa dicegah," ungkapnya, Minggu (19/9).

Perpanjangan Inpres Moratorium Sawit ini penting. Pasalnya, berdasarkan data Yayasan Madani Berkelanjutan, terungkap bahwa pada akhir 2020 lalu ada 8,4 juta hektare (ha) kebun sawit tak berizin. Selain itu, ada 10,7 juta ha izin kebun sawit yang tak bertutupan.

Teguh Surya, Pendiri Yayasan Madani Berkelanjutan mengatakan, dari data tersebut saja masih terdapat banyak lahan yang tidak diketahui statusnya. Alhasil, tata kelola perizinan sawit belum selesai sehingga moratorium perlu diperpanjang.

"Permasalahan ini dapat terjawab melalui evaluasi perizinan, pengecekan antara area perkebunan sawit de-

ngan data perizinan, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan termasuk di wilayah kelola masyarakat," kata Teguh.

Sebelumnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengatakan, wacana perpanjangan moratorium izin perkebunan sawit tengah dilakukan di tingkat kementerian. "Kami evaluasi, kalau efektif akan kami lanjutkan," ujar dia beberapa waktu lalu.

Abdul Basith, Ratih Waseso

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☒ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL	20/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN	11 /
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI	☒ Berita
☒ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya		☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan		☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post		☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika			☐ Pojok/Karikatur

Semester II-2021 Ekspor Sawit Lebih Baik

JAKARTA—Ekspor minyak sawit nasional pada semester II-2021 diperkirakan lebih tinggi dari semester I-2021 didorong oleh permintaan yang meningkat dan *booming* harga minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) di pasar internasional. Dari data yang diolah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), ekspor minyak sawit Indonesia pada semester I-2021 telah mencapai 15,78 juta ton senilai US\$ 15,67 miliar. (D. H)

Direktur Utama dan Pendiri PT Nusantara Sawit Sejahtera Teguh Patriawan mengatakan, ketika pandemi Covid-19 mewabah dan masih tinggi pada tahun lalu, industri sawit masih bertahan dan nilai ekspornya bagus. "Memasuki tahun ini, dengan adanya vaksinasi di hampir semua negara yang membuat perekonomian global membaik maka akan mendorong kinerja ekspor sawit RI. Tahun ini, ekspor sawit nasional pasti lebih baik daripada tahun lalu," kata Teguh Patriawan. Bisa jadi, ekspor minyak sawit Indonesia tahun ini mampu menembus atau melampaui US\$ 30 miliar.

Kinerja ekspor sawit pada semester I-2021 sudah baik maka raihan pada semester II-2021 diyakini lebih tinggi dari semester I-2021 karena permintaan yang meningkat dibarengi lonjakan harga. Tingginya permintaan minyak

sawit juga dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan minyak bunga matahari sehingga sawit yang bisa mengisi posisinya. "Untuk pasar ekspor terbesar masih India ditambah perekonomian India juga membaik dan pemerintahnya menurunkan bea masuk (BM) impor produk sawit. Penurunan tarif BM ini cukup mempengaruhi kinerja ekspor sawit pada semester II-2021," jelas dia.

Merujuk data Bank Dunia, rata-rata harga CPO pada Januari-Agustus 2021 menembus US\$ 1.070 per ton, jauh melebihi rata-rata harga pada 2020 yang mencapai US\$ 752 ton dan pada 2019 sebesar US\$ 601 per ton. Ekspor minyak sawit Indonesia pada semester I-2021 (Januari-Juni) telah mencapai 15,78 juta ton senilai US\$ 15,67 miliar. Sedangkan sepanjang 2020, ekspor mencapai 34,01 juta ton senilai US\$ 22,97 miliar.

Moratorium Sawit

Saat ini, pelaku usaha saat ini dalam posisi menunggu keputusan pemerintah atas Inpres Moratorium Sawit tersebut, apakah diperpanjang atau disetop yang membawa konsekuensi dengan dibukanya kembali perizinan sawit. Teguh Patriawan mengatakan, sebenarnya kebijakan moratorium sawit yang dikeluarkan pemerintah sangat bagus untuk keberlanjutan lingkungan dan tentunya mengurangi deforestasi.

Apalagi, selama ini isu deforestasi sangat dekat dengan sawit, dengan adanya kebijakan moratorium diharapkan lingkungan menjadi lebih sehat.

Kebijakan moratorium sawit yang tertuang dalam Inpres No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau Inpres Moratorium Sawit telah habis masa berlakunya pada 19 September ini. Koalisi Moratorium Sawit yang terdiri dari beberapa kelompok masyarakat sipil yang memiliki perhatian akan kondisi tata kelola sawit Indonesia menilai bahwa kebijakan moratorium sawit penting untuk diperpanjang sekaligus diperkuat dalam berbagai aspek.

Pengkampanye Forest Watch Indonesia (FWI) Agung Ady sangat mendukung moratorium sawit diperpanjang tapi dengan catatan harus dilaksanakan serius dan lebih transparan. Publik harus lebih banyak dilibatkan dalam prosesnya, baik dalam hal evaluasi perizinan hingga penyebarluasan informasi hingga ke level daerah, sehingga tidak ada lagi kepala daerah yang tidak menjalankan kebijakan ini karena telat mendapatkan informasi. Pemerintah pusat juga harus mau terbuka jika menemukan kendala dalam mengimplementasikan kebijakan itu. (dho/tl)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☒ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 20/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☒ Republika		☐ Pojok/Karikatur

BUMN Kejar Swasembada Gula

■ IIT SEPTYANINGSIH,
DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong *holding* BUMN perkebunan mewujudkan swasembada gula konsumsi. Sesuai target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia diharapkan bisa swasembada pada 2024-2025.

Hal tersebut disampaikan Erick dalam kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (18/9). Di kabupaten terujung Pulau Jawa tersebut, Erick meninjau PT Industri Gula Glenmore (IGG) yang memiliki lahan seluas 102,4 hektare. Pabrik tersebut berada di bawah pengelolaan PT Perkebunan Nusantara XII.

Erick mengapresiasi transformasi yang dilakukan PT IGG, baik dari sisi produksi maupun penerapan teknologi modern dalam pengolahan gula. Ia berharap, transformasi tersebut dapat mendorong terwujudnya swasembada gula konsumsi bagi Indonesia.

Dengan luas seluruh lahan yang dikelola *holding* BUMN perkebunan, Erick menegaskan, Indonesia harus bisa menjadi negara dengan industri gula yang solid. "Melalui produksi gula yang terus meningkat dan penerapan teknologi modern di industri ini, saya harap, PT IGG menjadi bagian dari usaha terwujudnya swasembada gula konsumsi. Itu merupakan bagian dari ketahanan pangan," kata Erick dalam keterangannya.

Rata-rata produksi gula nasional tercatat sebesar 2,2 juta ton per tahun. Adapun kebutuhan gula konsumsi per tahun mencapai 2,8 juta ton dan gula industri 3,62 juta ton. Dengan kata lain, angka impor gula per tahun saat ini mencapai lebih dari empat juta ton. R-1

Erick mengatakan, pemerintah sudah memiliki peta jalan mengenai realisasi swasembada gula konsumsi. Presiden Jokowi pun turut memberikan dukungan. "Meski banyak tantangan,

tetapi lillahi ta'ala kita harus jalankan," tutur Erick.

Walau tetap memerlukan peran swasta, kata Erick, sudah saatnya perusahaan BUMN yang bergerak dalam bisnis perkebunan tebu dan gula bergabung dalam satu *holding* demi mewujudkan mimpi lama tersebut. Saat ini, terdapat tujuh anak perusahaan PTPN yang bergerak di industri tebu dan gula, yaitu PTPN VII di Lampung, PTPN IX sampai XII di Jawa Timur, dan PTPN XIV di Sulawesi Selatan.

Menurut Erick, restrukturisasi yang dilakukan di PTPN XII telah memberikan hasil maksimal. Ini terlihat dengan membaiknya keuangan dan memberi keuntungan. Erick mengingatkan, swasembada gula juga memerlukan kolaborasi dengan rakyat dan instansi lain. "Saya minta melibatkan petani tebu rakyat," katanya.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan lahan Perhutani untuk peningkatan lahan produksi dari 45 ribu hektare menjadi 85 ribu hektare. Kemudian, jumlah lahan secara perlahan ditambah hingga menjadi 250 ribu hektare pada 2024-2025. "Jika hal itu tercapai, impian Indonesia menjadi negara pengekspor gula akan terwujud," jelas dia.

Ia menegaskan, keinginan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, terutama pada komoditas yang dimiliki dan menjadi kekayaan Indonesia, terus diupayakan oleh Kementerian BUMN kepada perusahaan BUMN. "Sudah satnya kita jangan hanya menjadi *market* saja. Melalui potensi yang kita miliki, industri gula harus menjadi tulang punggung ekonomi yang penting ke depannya," tegas Erick.

Dalam kunjungannya ke Banyuwangi, Erick juga meresmikan pabrik pupuk hayati Bio-neensis. Pabrik itu merupakan

hasil kerja sama antara PT IGG dan PT Riset Perkebunan Nusantara yang merupakan anak usaha *holding* perkebunan PTPN III (Persero).

Erick berharap, langkah yang dilakukan PTPN III bisa turut mendukung target swasembada gula nasional pada 2025. "Kita sudah melihat keberadaan PTPN ini harus menjadi manfaat buat petani. Sekarang kita lihat, kita mau PTPN ini bisa jaga keseimbangan gula nasional," katanya.

Erick menuturkan, produksi gula PTPN sudah meningkat menjadi sekitar 800 ribu ton. Namun, jumlah tersebut belum cukup memenuhi kebutuhan nasional, sehingga pemerintah masih membuka keran impor. "Tetapi untuk 2024-2025, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kita mengharapkan kita bisa mulai menata swasembada beras dan gula," katanya.

Erick menyebut, pada 1930-an Indonesia menjadi salah satu negara produsen gula dunia. Namun, prestasi itu terus menurun hingga pascakemerdekaan. "Pada 2025, kita mulai kembali swasembada. Kita berupaya, kita kerja maksimal. Tapi, saya harapkan, kinerja PTPN, apalagi kemarin habis restrukturisasi, sekarang sudah terlihat," katanya.

Direktur Utama PTPN III Mohammad Abdul Ghani mengatakan, pihaknya akan menjadi bagian dari upaya mendukung target swasembada gula. "Pada 2024, target kami adalah 1,8 juta ton produksi gula," katanya.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Butuh keberpihakan

Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menilai, butuh keseriusan dan keberpihakan dari pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula pada 2025. Menurut dia, kebijakan di sektor gula, saat ini, tidak mendukung petani yang membuat petani tebu kurang bergairah dalam meningkatkan produksi.

Sekretaris Jenderal APTRI Nur Khabsyin mengakui, pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus menggalakkan peningkatan produktivitas tebu lewat sejumlah kebijakan. Namun,

kebijakan yang fokus pada sisi hulu itu akan kurang bermanfaat ketika harga produk di hilir sangat murah dan tidak sesuai dengan besarnya biaya produksi gula tebu.

"Ada upaya peremajaan, tapi ketika sudah dipanen harga tebu murah, itu artinya mendistorsi kebijakan karena tidak ada harmonisasi," kata Khabsyin.

Ia menyebut, saat ini, harga gula sedang turun ke level Rp 10.400-Rp 10.500 per kg. Produksi gula tahun ini juga diperkirakan turun karena masih adanya tunggakan pembayaran gula petani oleh perusahaan. Hal itu mengakibatkan petani enggan untuk menambah luasan dan mengganti komoditas.

"Swasembada gula sudah dicanangkan sejak era SBY. Tahun 2018, mundur 2019 lalu 2022, sekarang mau 2025. Tetap tidak bisa karena kebijakan saling mendistorsi," kata dia.

Ia mengakui, petani saat ini lebih memprioritaskan menjual tebunya ke perusahaan giling swasta. Sebab, harga pembelian

tebu dari perusahaan swasta lebih baik daripada pembelian harga pembelian oleh BUMN.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai, mewujudkan swasembada gula dalam lima tahun ke depan bukan pekerjaan mudah. Sebab, meskipun pemerintah berupaya untuk terus menambah pabrik gula baru, ketersediaan tebu dalam negeri belum mencukupi.

Rusli menilai, pembangunan sisi hulu dan hilir harus beriringan agar para investor memiliki minat dalam berusaha di Indonesia. Meski begitu, Rusli mengapresiasi langkah pemerintah yang terus menggalakkan pembangunan pabrik gula baru.

Hal ini seperti yang dilakukan oleh PT Industri Gula Glenmore dan PT Riset Perkebunan Nusantara yang merupakan anak usaha *holding* perkebunan PTPN III (persero). "Kita harus apresiasi karena sudah ada keberpihakan untuk membenahi sektor gula tebu nasional," kata dia. ■ antara ed: satria kartika yudha

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL - 20/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Menteri Erick Berharap RI Swasembada Gula pada 2025

Oleh Ridho Syukra

► JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengharapkan Indonesia sudah bisa swasembada gula pada 2025. Untuk itu, peran maksimal dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group melalui lini bisnis gulanya sangat dinantikan. Saat ini, produksi gula PTPN Group mencapai 800 ribu ton, pada 2024 ditargetkan 1,80 juta ton dan pada 2025 menjadi sekitar 2 juta ton.

Demikian disampaikan Menteri Erick saat meresmikan pabrik pupuk hayati Bioneensis di Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (18/9), yang merupakan hasil kerja sama antara PT Industri Gula Glenmore (IGG) dan PT Riset Perkebunan Nusantara, anak usaha PTPN Group. Erick berharap langkah yang dilakukan PTPN itu bisa turut mendukung target swasembada gula nasional pada 2025. "Kita sudah melihat keberadaan PTPN, ini harus menjadi manfaat buat petani. Sekarang kita lihat, kita mau PTPN ini bisa jaga keseimbangan gula nasional," kata Erick.

Produksi gula PTPN saat ini sudah meningkat menjadi sekitar 800 ribu ton. Jumlah itu masih belum cukup memenuhi

kebutuhan nasional sehingga pemerintah masih membuka keran impor. "Tetapi untuk 2024-2025, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kita mengharapkan kita bisa mulai menata swasembada beras dan gula," katanya. Pada 1930-an, Indonesia menjadi salah satu negara produsen gula dunia, namun prestasi itu terus menurun hingga pascakemerdekaan. "Pada 2025, kita mulai kembali swasembada. Kita berupaya, kita kerja maksimal, saya harapkan kinerja PTPN, apalagi kemarin habis restrukturisasi, sekarang sudah terlihat," jelas Erick.

Direktur Utama PTPN Group Mohammad Abdul Ghani mengatakan, pihaknya akan jadi bagian dari upaya mendukung target swasembada gula nasional. "Pada 2024, target produksi gula kami adalah 1,80 juta ton," ujar dia. Saat ini, PTPN Group

memiliki tujuh PTPN gula yang menaungi 35 pabrik gula (PG), yakni PTPN II di Sumatera Utara (Sumut), PTPN VII di Sumbagsel, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, dan PTPN XII di Jawa Timur, dan PTPN XIV di Sulawesi Selatan (Sulsel). PTPN Group tengah merestrukturisasi PTPN gula dengan membentuk Sugar Company (SugarCo). SugarCo merupakan penggabungan dari tujuh PTPN gula menjadi entitas tunggal (*single entity*). Dengan upaya itu, pada 2025, produksi gula PTPN menjadi 2 juta ton.

Dalam rangkaian kunjungannya, Erick menyempatkan diri meninjau kebun tebu, memberikan bantuan bibit dan pupuk ke petani tebu, serta meninjau Pabrik Gula (PG) Glenmore. PG Glenmore atau IGG dikelola PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII), anak usaha PTPN Group, di lahan seluas 102,40 hektare (ha) yang terletak di Desa Karang Harjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Produk gula pasirnya diberi nama Nusakita, kini menjadi andalan PTPN XII. IGG dengan PG Glenmore tergolong PG nasional modern dengan mesin pengolah tebu bertingkat produktivitas tinggi dan berkapasitas 6.000 TCD (*ton of cane per day*).

Sedangkan PTPN XII bergerak di bidang agribisnis dengan komoditas utama berupa tebu, karet, kopi, kakao, teh, dan kayu, termasuk pula produk nonkomoditas seperti horti-

kultura, agrowisata, dan produk lainnya, termasuk pupuk hayati yang diproduksi IGG. Pupuk Bioneensis merupakan pupuk hayati yang diformulasikan untuk semua komoditas tanaman. Bioneensis mengandung konsorsium mikroba bermanfaat yang diisolasi dari perakaran kelapa sawit dan memiliki daya adaptasi serta asosiasi yang tinggi pada berbagai komoditas seperti tanaman perkebunan, tanaman pangan, sayuran, dan hortikultura di antaranya kelapa sawit, tebu, jagung, padi, sayuran, cabai, jeruk, tanaman hias, papaya, dan bawang merah. Di pabrik Bioneensis di Banyuwangi, limbah tebu akan jadi bahan baku pupuk yang dimanfaatkan lagi untuk perkebunan tebu.

Libatkan Petani

Dalam kesempatan itu, Erick Thohir menuturkan, untuk menuju swasembada gula konsumsi maka diperlukan kolaborasi antara PTPN dengan rakyat (petani) dan instansi lain, seperti Perhutani. Dengan kolaborasi itu diharapkan ada peningkatan lahan produksi dari 45 ribu

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 4 / 1 |
| ☒ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

ha menjadi 85 ribu ha, lalu secara perlahan hingga 2024-2025 harus menjadi 250 ribu ha. Dengan upaya itu, Indonesia bukan hanya swasembada tapi juga menjadi negara pengekspor gula.

Menteri Erick menjanjikan petani tebu di Jatim akan mendapatkan bibit berkualitas dari PTPN XII pada tahun depan. Transformasi yang dilakukan PTPN jangan malah menyusahkan rakyat, karena itu kemajuan

PTPN harus mendorong mereka punya riset bagus sehingga bisa menghasilkan bibit kualitas yang menolong petani tebu. "Saya apresiasi kemajuan PTPN XII yang direpresentasikan IGG karena mencapai rendemen dan persentase gula tebu tertinggi dilingkup PG BUMN. Terlebih, perusahaan ini memiliki potensi lain berkat kemajuan teknologi industri yang digunakan. Harapannya, semua ini berdampak langsung kepada

peningkatan kualitas usaha tani tebu dan para petani di Banyuwangi," kata Erick

Menteri BUMN yang juga didampingi mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sempat berdialog ringan dengan para petani tebu, melakukan panen tebu dan melihat penanaman bibit tebu dari atas mesin traktor penanam tebu. "Jika perusahaan BUMN yang industrinya dekat dengan rakyat bisa maju maka mereka juga

semangat. Terlebih jika BUMN ikut mendampingi para petani tebu di Banyuwangi sehingga usaha taninya makin berkualitas dan lebih sejahtera menikmati hasil jerih payahnya," ujar Menteri BUMN. Karena itu, Erick berpesan kepada PTPN meningkatkan keberpihakan pada tebu rakyat dengan cara menghilangkan permainan dalam menilai rendemen tebu milik petani, pemberian bibit unggul, dan bantuan pupuk. (tl/ant)

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 19/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☒ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Komisi IV Puji Kementan

Alsintan Bikin Petani Semangat Berproduksi

PENGADAAN bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) terbukti mampu meningkatkan minat masyarakat untuk bertani. Hasilnya pun luar biasa.

Saat hampir semua sektor mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19, sektor pertanian tetap mampu berkontribusi mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini diungkap anggota Komisi IV DPR, Hermanto.

"Karena itu saya menyampaikan apresiasi kepada petani, karena memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi," katanya, dalam sambutan saat penyerahan bantuan alsintan di Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat, kemarin.

Dia pun mengajak petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian di lahan miliknya. Dengan bantuan alsintan seperti handtraktor dan pompa air, pertanian menjadi lebih efisien. "Dengan bantuan ini diharapkan produktivitas meningkat dan lambat laun kesejahteraan petani juga meningkat," yakin Hermanto.

Secara terpisah, Ketua Umum Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) Retno Sri Endah Lestari menegaskan, penggunaan alsintan terbukti mampu menekan biaya usaha tani, sehingga memberikan keuntungan petani dalam memaksimalkan lahannya.

Distribusi alsintan yang digencarkan Pemerintah setiap tahun juga berkontribusi besar pada pencapaian swasembada pangan.

Namun demikian, sambung Retno, mekanisasi pertanian butuh pemetaan kebutuhan dan ketersediaan yang dibarengi kelembagaan yang memadai. Jika hal tersebut dilakukan, biaya usaha tani bisa lebih dapat ditekan, efisiensi di pertanian juga dapat lebih baik lagi.

Mekanisasi pertanian, lanjutnya, dapat meningkatkan derajat dan taraf hidup petani, kuantitas dan kualitas produksi pertanian. "Sehingga memungkinkan pertumbuhan tipe usaha tani dari tipe subsistem *farming* menjadi tipe pertanian korporasi. Ini bisa mempercepat bentuk ekonomi Indonesia dari sifat agraris menjadi industri," yakinnya.

Seiring hal tersebut, lanjut Retno, distribusi bantuan alsintan secara nasional menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Terutama sejak dicanangkannya program Upaya Khusus Pertanian untuk percepatan produksi jagung, padi dan kedelai (pajale).

Sebelum 2016, rata-rata pertumbuhan program bantuan alsintan ada pada kisaran 11-124 persen. Namun setelah Program Upsus dicanangkan, bantuan alsintan ke petani

naik signifikan menjadi 63 hingga 1190 persen dari 2016. "Artinya (mekanisasi pertanian) naik hampir 10 kali lipat," tegasnya.

Sementara Direktur Alsintan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Ditjen PSP Kementan), Andi Nur Alam Syah menegaskan, Kementan terus berupaya memacu level mekanisasi pertanian. Hal ini bukan perkara mudah, mengingat masih banyak lahan pertanian yang tidak didukung irigasi pertanian yang memadai.

"Tapi sejak tujuh tahun kemarin, perencanaan kita sudah sangat memperhatikan struktur tanah, sehingga tidak ada lagi bantuan-bantuan yang salah distribusi," tegasnya.

Di satu sisi, memang dia mendapati masih ada beberapa wilayah yang tidak optimal dalam penggunaan bantuan alsintan Pemerintah. Namun, Dinas Pertanian daerah bersama para penyuluh akan terus melakukan pembinaan kepada petani di lapangan.

"Ada alsintan yang tidak digunakan sesuai kapasitas kerjanya, mungkin iya. Ini yang harus kita dorong bersama, agar kecepatan pengembangan mekanisasi yang masif ini diikuti peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lapangan," tegasnya. ■ KAL

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☒ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 20/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 11 / 10
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☒ Investor Daily	☒ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

Gobel Salurkan Bantuan Pupuk di Madiun

MADIUN – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyalurkan bantuan 5 ton pupuk kepada para petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Bantuan pupuk dari PT Pupuk Kaltim itu pada Sabtu (18/9) itu merupakan bagian dari program aspirasi Rachmat Gobel. (19-11)

Penyerahan bantuan itu dilakukan oleh Staf Khusus Wakil Ketua DPR Nining Indra Shaleh. Acara penyerahan pupuk kepada kelompok tani yang diadakan di Desa Mendak itu dihadiri Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Timur Sri Sajekti Sudjunadi, Ketua DPD Kabupaten Madiun Partai NasDem Taupan Devyanto, Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Jawa Timur VIII Soehartono,



Rachmat Gobel

Walikota Kota Madiun Maidi, dan VP Manager Ritel PT Pupuk Kaltim Wisnu Ramadhani. Penyerahan bantuan pupuk pada tahap awal ini diberikan kepada Kelompok Tani dari lima

desa yakni Desa Mendak, Desa Segulung, Desa Ngeranget, Desa Padas, dan Desa Tileng. Selain bantuan pupuk, PT Pupuk Kaltim juga membawa mobil Laboratorium Tanah.

Nining Indra menegaskan, bantuan pupuk yang disalurkan melalui aspirasi Rachmat Gobel diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Dalam dialog pada acara itu, para petani sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Partai NasDem dan PT Pupuk Kaltim atas bantuan yang diberikan kepada mereka. Para petani juga mengeluhkan kondisi kesejahteraan mereka karena harga hasil produksi dari petani ditentukan para tengkulak. Hal

ini berakibat para petani tidak dapat maksimal menikmati hasil produksi pertaniannya.

Dalam pertemuan itu, salah satu solusi yang ditawarkan Walikota Kota Madiun adalah dengan memotong rantai tengkulak agar harga hasil pertanian petani dapat dibeli dengan harga tinggi. Hal ini dapat dilakukan jika pemerintah daerah berperan aktif dalam membuat terobosan kebijakan untuk kesejahteraan para petani. DPW Partai NasDem juga berkomitmen menjadi Konco Sejatine Wong Tani atau teman sejati petani dengan cara terus menerus memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan bagi petani, khususnya di Provinsi Jawa Timur. (11)

Sulawesi Selatan Terus Membangun Bendungan

TAHUN lalu, Sulawesi Selatan menjadi provinsi penghasil padi terbesar keempat di Tanah Air. Dukungan dari pemerintah pusat bagi daerah ini untuk terus meningkatkan produksi pertaniannya masih belum kendur.

Tahun ini, dua bendungan sudah diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo, yakni Bendungan Paselloreng dan Gilireng, di Kabupaten Wajo. Cukup? Ternyata belum.

Seperti diungkapkan Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, masih ada Bendung Karellloe di Kabupaten Gowa yang akan dioperasikan Oktober. Selain itu, ada Bendung Lalengrie di Kabupaten Bone yang pembangunannya sudah mencapai 85%. Bendung ini akan mengaliri 1.100 hektare lahan pertanian.

"Bendung dan bendungan masih sangat dibutuhkan masyarakat di Sulawesi Pertanian. Infrastruktur itu bermanfaat untuk irigasi pertanian sehingga produksi pertanian bisa terus ditingkatkan," tambah Andi. (LN/N-2) M. g

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 11 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

PRODUKSI BERAS

Petani Kalteng Beralih ke Sawit dan Karet

PULANG PISAU, KOMPAS — Petani di Kalimantan Tengah beralih dari menanam padi ke budidaya perkebunan sawit, karet, sengon, dan tanaman keras lain. Hal itu terjadi karena larangan membakar dan tingginya biaya produksi. Dampaknya, produksi padi terus turun.

Di Desa Kantan Atas, Kabupaten Pulang Pisau, misalnya, 80 persen warganya beralih dari pertanian sawah ke perkebunan sejak tahun 2016.

"Kami sudah mencoba tetap menanam di sawah tanpa membakar, tetapi biayanya lebih mahal, hasilnya enggak seberapa," kata Sekretaris Desa Kantan Atas Petrus Sukarmin, di Pulang Pisau, Minggu (19/9/2021).

Pulang Pisau merupakan salah satu daerah langganan kebakaran lahan yang terjadi hampir setiap tahun. Tahun 2015 menjadi salah satu tahun bencana terburuk yang dialami warga. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan membakar untuk membersihkan lahan.

Sejak bencana itu, pemerintah memberlakukan larangan membakar. Warga yang tepergok membakar akan diproses hukum.

Petrus pun mengalihkan sekitar 2 hektar lahan untuk ditanami sawit. Kini, sawitnya sudah

berumur empat tahun dan mulai panen. Dari 2 ha lahan, 1,5 ha ditanami sawit, sisanya ditanami karet.

"Tapi, selama menunggu sawit dan karet bisa panen, kami kerja serabutan. Ada yang jadi buruh sawit, ke luar kota, sekarang mulai sibuk mengolah kebun. Beras beli," ujarnya.

Hal serupa terjadi di Desa Talio Hulu. Sekretaris Desa Talio Hulu Widodo menjelaskan, saat ini lahan pertanian yang masih digunakan untuk menanam padi sekitar 1.500 ha. Sebelumnya mencapai 3.500 ha.

Di lahan sisa pertanian itu pun warga mulai beralih menanam karet dan sawit di perbatasan petak sawah, termasuk lahan milik Widodo. "Saya sudah mulai menanam sawit, harganya lagi bagus," lanjutnya.

Data produksi

Peralihan dari padi ke komoditas lain itu berdampak pada banyak hal, salah satunya adalah turunnya produksi padi di Kalimantan Tengah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, produksi padi tahun 2020 sebanyak 425.110 ton gabah kering giling (GKG); di bawah produksi tahun sebelumnya yang sebesar 443.560 ton atau turun 18.450 ton. Penurunan produksi itu karena

luas lahan panen juga menurun dari 146.140 ha pada 2019 menjadi 144.210 ha tahun 2020.

Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2018, produksi tahun 2019 turun cukup drastis hingga 71.210 ton GKG. Tahun 2018, Kalteng mampu memproduksi 514.770 ton GKG.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kembali produksi pertanian melalui Program Strategis Nasional Food Estate.

Dihubungi melalui pesan singkat, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kalteng Sunarti menjelaskan, luas lahan program itu di Kabupaten Pulang Pisau 10.000 ha dengan luas panen 9.637 ha. Hasil tahun 2020 mencapai 30.275 ton padi.

Selain perkebunan, beberapa desa di Pulang Pisau juga mendapat program bantuan untuk revitalisasi ekonomi dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melalui lembaga Kemitraan. Mereka membentuk kelompok usaha, di antaranya budidaya jamur tiram dan produksi kopi liberika.

Di Desa Talio Hulu, Kelompok Wanita Tani bentukan BRGM memproduksi kopi liberika dengan kemasan sendiri, lalu dijual ke warung kopi hingga kafe. (IDO) k. 11

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☒ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |



Realisasi Serapan Anggaran Kementerian Pertanian

Petani menarik padi hasil panennya melalui saluran irigasi di Desa Talio Hulu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Minggu (19/9/2021). Data Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementan per 21 Agustus 2021 mencapai Rp 7,85 triliun atau 48,35 persen dari pagu Rp 16,25 triliun, hal tersebut mencakup kegiatan pengembangan kebutuhan pangan nasional.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

RI Butuh Investasi Pertanian

■ DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA— Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor pertanian. Investasi dinilai penting demi meningkatkan produktivitas pertanian di dalam negeri.

"Peningkatan produktivitas pertanian Indonesia membutuhkan beberapa faktor, seperti investasi yang akan memodernisasi pertanian, peningkatan akses kepada irigasi dan peningkatan akses pada input pertanian," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Setiawan dalam keterangannya kepada *Republika*, Ahad (19/9). R. 7

Indra mengatakan, agar investasi pertanian dapat meningkat, pemerintah diingatkan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi sektor swasta. Ia pun berharap rencana pembentukan holding BUMN pangan tidak membuat menurunnya faktor kompetisi di sektor pertanian.

Investasi di sektor pertanian Indonesia

masih tergolong rendah. Investasi asing di sektor ini hanya sebesar 3 persen - 7 persen dari total Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019. Sebagian besar investasi pun masuk ke sektor kelapa sawit. Sedangkan untuk sektor pertanian lainnya, seperti tanaman pangan dan hortikultura, masih jauh lebih rendah.

Indra mengatakan, penelitian Fane & Warr (2008) menyebutkan bahwa di bawah kepemimpinan presiden Soeharto, petani tebu dipaksa untuk memasok hasil panen pertanian hanya ke pabrik gula milik negara. Meski kebijakan ini dicabut pada 1998, pembatasan investasi tetap dilanjutkan dan menyebabkan penggilingan gula sulit mengalami pembaruan. Dampak dari hal tersebut dapat dirasakan hingga sekarang. Sekitar 40 dari 63 pabrik gula di Indonesia berusia di atas 100 tahun, sehingga menghasilkan gula melalui proses yang tidak efisien dan membutuhkan revitalisasi.

"Rendahnya investasi di sektor pertanian juga dapat berdampak pada terham-

batnya upaya meningkatkan kemampuan manajerial di sektor pertanian.

Sebelumnya, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI mengungkapkan proses pembentukan holding BUMN sektor pangan memasuki tahap penggabungan atau *merger* beberapa perusahaan. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia atau RNI (Persero), Arief Prasetyo Adi mengatakan, sebagai koordinator BUMN klaster pangan, pihaknya saat ini melakukan persiapan penggabungan secara menyeluruh, mulai dari aspek regulasi penggabungan, SDM dan organisasi.

Ia menambahkan, pihaknya gencar menyosialisasikan penggabungan kepada karyawan, aspek keuangan penggabungan perusahaan, operasional dan pengembangan IT, hingga aspek aset korporasi. "Seperti pada aspek IT, kami sudah memulai mengintegrasikan IT dan *supply chain*, melalui basis teknologi Internet of Things (IoT) dengan *interface* yang sederhana," kata dia. ■ antara ed: satria kartika yudha

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Dalam Pertemuan G20, Indonesia Dukung Pertanian Afrika Capai Target SDGs

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak negara G20 meningkatkan peran sektor pertanian berkelanjutan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama untuk Afrika. Dukungan untuk kawasan Afrika melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani dalam meningkatkan produksi pertanian dapat menciptakan ketahanan pangan global.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menekankan, negara G20 harus memegang peran penting dalam membangun lingkungan global yang kondusif untuk mendorong investasi di sektor pertanian serta memastikan perdagangan pangan dan pertanian yang adil dan lancar, khususnya untuk mendukung Afrika dalam pencapaian target SDGs 2030 terutama tujuan dua yaitu "penghapusan kelaparan".

"Indonesia terus mendukung Afrika dengan berbagi pengalaman mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam meningkatkan produksi pertanian dan pencapaian ketahanan pangan dan gizi," ucap Syahrul dalam sambutan pada Open Forum on Sustainable Agriculture, Italia, Jumat (17/9/2021).



1

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 20/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 3 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☒ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

Kemitraan dengan Afrika

Syahrul mendorong kemitraan G20 dan Afrika juga harus dapat memberikan dampak yang luas dengan menjadikan Afrika sebagai bagian dari solusi, termasuk dengan pemanfaatan secara optimal potensi yang dimiliki oleh Afrika. Dalam hal ini, kemitraan tersebut juga diharapkan sejalan dengan kebutuhan dan prioritas Afrika.

"Kawasan Afrika terus menghadapi tantangan yang cukup serius akibat perubahan iklim, bencana alam, hama, penyakit tanaman, dan ternak lintas negara. Permasalahan ini diperberat dengan munculnya pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir," ucap Syahrul. K-9

Diketahui, sejarah kedekatan Afrika dengan Indonesia yang telah dibangun sejak KTT Asia Afrika tahun 1955. Sejak saat itu, Indonesia telah turut serta mengembangkan sektor pertanian di Afrika dan telah berlangsung hingga tahun 2019 melalui pendirian Farmers Agriculture and Rural Training Center pada tahun 1996 serta program kerja sama teknis dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangu-



lar (KKST) berupa pemberian bantuan alat dan mesin pertanian, pelatihan, pengiriman tenaga ahli dan kegiatan lainnya di 16 negara Afrika. Kerja sama KSST yang telah dilakukan oleh Indonesia diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi negara lainnya untuk terus meningkatkan kemitraan dengan Afrika.

Open Forum on Sustainable Agriculture diselenggarakan di Florence, Italia, pada 16-18 September 2021. Pertemuan tersebut merupakan side event pendahuluan dari Agriculture Ministerial Meeting G20 Italia yang akan dihadiri oleh Menteri Pertanian dan akan berlangsung pada 17-18 September 2021 di tempat yang sama. [*]

2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Indonesia Dukung Pertanian Afrika Capai Target SDG's

PEMERINTAH melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak negara-negara G20 guna meningkatkan peran sektor pertanian berkelanjutan dalam pencapaian Sustainable Development Goals terutama untuk negara-negara di kawasan Afrika.

Dukungan untuk kawasan Afrika melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani dalam meningkatkan produksi pertanian dapat menciptakan ketahanan pangan global. M-5

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menekankan negara G20 harus memegang peran penting dalam membangun lingkungan global yang kondusif untuk mendorong investasi di sektor pertanian serta memastikan perdagangan pangan dan pertanian yang adil dan lancar, khususnya untuk mendukung negara-negara Afrika dalam pencapaian target SDG 2030 terutama tujuan kedua yaitu penghapusan kelaparan.

"Indonesia terus mendukung negara-negara Afrika dengan berbagi pengalaman mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam meningkatkan

produksi pertanian dan pencapaian ketahanan pangan dan gizi," ungkap Syahrul dalam sambutan pada *Open Forum on Sustainable Agriculture*, yang diselenggarakan di Italia, Jumat (17/9) lalu.

Syahrul mendorong kemitraan G20 dan negara-negara Afrika juga harus dapat memberikan dampak yang luas dengan menjadikan Afrika sebagai bagian dari solusi, termasuk dengan pemanfaatan secara optimal potensi yang dimiliki oleh Afrika. Dalam hal ini, kemitraan tersebut juga diharapkan sejalan dengan kebutuhan dan prioritas Afrika.

"Kawasan Afrika terus menghadapi tantangan yang cukup serius akibat perubahan iklim, bencana alam, hama, penyakit tanaman dan ternak lintas negara. Permasalahan ini diperberat dengan munculnya pandemi covid-19 yang masih belum berakhir," ucap Syahrul.

KTT Asia Afrika 1955

Seperti diketahui, sejarah kedekatan negara-negara Afrika dengan Indonesia telah dibangun sejak penyelenggaraan KTT Asia Afrika

tahun 1955.

Sejak saat itu, Indonesia telah turut serta mengembangkan sektor pertanian di Afrika dan telah berlangsung hingga 2019 melalui pendirian *Farmers Agriculture and Rural Training Center* pada 1996 serta program kerja sama teknis dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KKST) berupa pemberian bantuan alat dan mesin pertanian, pelatihan, pengiriman tenaga ahli, dan kegiatan lainnya di 16 negara kawasan Afrika.

Kerjasama KSST yang telah dilakukan oleh Indonesia diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi negara lainnya untuk terus meningkatkan kemitraan dengan Afrika.

Sekedar informasi, *Open Forum on Sustainable Agriculture* diselenggarakan di Florence, Italia, pada 16-18 September 2021. Pertemuan tersebut merupakan *side event* pendahuluan dari *Agriculture Ministerial Meeting G20 Italia* yang akan dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan akan berlangsung dari 17-18 September 2021 di tempat yang sama. (RO/S3-25)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |



2

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |



3

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Politik-Ekonomi Perungggasan



Khudori
Anggota Asosiasi
Ekonomi Politik Indonesia

PERSPEKTIF

Jalan hidup peternak unggas, terutama peternak mandiri, baik peternak pedaging maupun petelur, amat tidak mudah. Diskusi, mediasi, lobi, bagi-bagi ayam hidup dan telur hingga turun jalan dan berurusan dengan polisi telah mereka lalui. Bahkan, somasi hingga menggugat ke pengadilan juga ditempuh. Namun, sejauh ini belum ada hasil.

Dua kementerian teknis, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, seolah saling lempar bola panas. Setelah perwakilan peternak mengungkapkan aneka masalah yang dihadapi di depan Presiden Jokowi, 15 September lalu, apakah masalah bakal usai?

Diakui atau tidak, masalah di industri perungggasan tidak lagi bersifat teknis tapi telah menyentuh dimensi struktural. Masalah pun membentang dari hulu hingga hilir. Karena itu, hampir bisa dipastikan masalah yang membelit tidak akan selesai apabila solusi yang ditempuh masih seperti selama ini: pemusnahan telur

tertunas atau afkir dini induk ayam. Cara-cara seperti pemadam kebakaran itu tidak menyentuh akar masalah.

Pertama, di hulu hampir semua input produksi impor. Bukan hanya benih ayam (*grand parent stock/GPS*), tapi juga input pakan (bungkil jagung dan kedelai). Ketika harga GPS dan bahan pakan naik atau nilai rupiah tertekan, langsung berimbas di pasar domestik.

Kedua, dominasi integrator. Industri perungggasan terkonsentrasi pada segelintir pelaku, baik dalam penguasaan

aset, omzet maupun pangsa pasar. Integrasi pasar vertikal dan horizontal amat tinggi. Di sisi lain, ada peternak kecil yang jumlahnya ribuan.

Pada 2015, sebanyak 80% pangsa pasar unggas dan 63% pangsa pakan ternak di Indonesia dikuasai hanya lima pemain (*Partners*, 2017). Konsentrasi ini membuat pasar amat rentan. Hasilnya, di hulu peternak rakyat terjepit karena mereka terpisah dari integrasi vertikal hulu-hilir.

Pada hulu, mereka amat tergantung pada integrator, baik DOC (*day old chicks*), pakan maupun obat-obatan. Sedangkan di hilir, pedagang eceran dan konsumen akhir ayam dan telur selalu terombang-ambing oleh harga seperti roller coaster.

Kepada dua pembantunya, Menteri Perdagangan M. Lutfi dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Presiden Jokowi memerintahkan dua hal. Pertama, meminta agar memastikan harga jagung untuk pakan bagi peternak Rp4.500/kg. Kedua,

menyusun regulasi yang melindungi peternak. Harga jagung saat ini sudah jauh dari batas toleransi: Rp6.000/kg. Besaran ini jauh di atas harga acuan jagung untuk pakan seperti diatur di Permendag No. 7/2020: Rp4.500/kg. Padahal, jagung merupakan 55% penyusun pakan.

Dalam industri perungggasan, pengeluaran terbesar ada pada komponen pakan. Pakan mengambil porsi 70% dari seluruh ongkos produksi. Bila harga pakan terjangkau, terbuka peluang membangun industri perungggasan yang kompetitif. Tinggi-rendahnya harga jagung menjadi penentu harga akhir daging dan telur ayam. Akibat harga jagung yang tinggi, harga pakan saat ini naik 19% dibandingkan dengan tahun lalu. Ketersediaan jagung yang pasti dengan harga terjangkau merupakan pilar penting bagi industri perungggasan.

Jika harga jagung bisa ditekan sesuai permintaan Jokowi, dalam jangka pendek peternak mendapatkan jalan keluar salah satu input produksi yang harganya tinggi. Agar

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 20/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

solusi ini tidak seperti pemadam kebakaran, perlu ada kepastian pasokan jagung untuk pakan dengan harga khusus. Katakanlah Rp4.500/kg. Jika harga jagung di pasar tinggi atau di atas Rp4.500/kg, selisih harga pasar dengan harga khusus harus ditanggung pemerintah agar petani jagung tetap mendapatkan insentif ekonomi dalam berproduksi.

Pada saat yang sama, peternak rakyat juga harus mendapatkan kepastian harga jual daging dan telur ayam. Khusus peternak ayam broiler, harga ayam hidup di tingkat peternak sering jatuh di bawah harga acuan Permen-dag 7/2020: Rp19.000—Rp21.000/kg. Sementara biaya produksi Rp19.500/kg. Di sisi lain, harga ayam hidup dan karkas di konsumen tetap mahal. Dalam konteks inilah, pemerintah perlu membuat regulasi yang memihak: menyeimbangkan antara kepentingan peternak dan perusahaan integrator.

Mengapa? Karena kekuatan dua pelaku ini amat berbeda. Peternak rakyat berciri skala kecil (peliharaan kurang dari 5.000 ekor), berteknologi sederhana, rendah modal, dan akses pasar. Sebaliknya, integrator bermodal kuat, berteknologi mo-

dern, terintegrasi vertikal, dan mengendalikan pasar. Integrator juga mengembangkan pola kemitraan dengan peternak, yang dapat kemudahan akses input produksi dan pasar.

Dalam bingkai politik-ekonomi, tiap kebijakan selalu ada pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan. Konflik kepentingan klasik dalam politik-ekonomi adalah antara kebijakan yang menekankan efisiensi atau berorientasi pemerataan? Kepentingan siapa yang dipilih?

Mendorong integrator tanpa regulasi ketat tentu efisien. Namun ini mencederai pemerataan. Agar keduanya tetap eksis, perlu berbagi peran. Salah satunya dengan membagi pasar. Dengan segenap kelebihannya, integrator melayani pasar premium, yakni pasar hotel, restoran dan katering, pasar modern, dan pasar ekspor melalui rantai dingin (*cold chain*). Sebaliknya, pasar tradisional dilayani peternak rakyat melalui rantai segar (*fresh chain*). Pemisahan pasar ini akan mengeliminasi watak predatorik integrator.

Saat ini, 90% komoditas ayam (produksi peternak rakyat dan integrator) dijual dalam bentuk hidup di lapak sama: pasar basah.

Sisanya dipasarkan dalam bentuk olahan. Pemisahan pasar mesti diikuti pembagian ulang kuota DOC broiler dan pengawasan ekstra ketat.

Berikutnya, integrator wajib menyelesaikan integrasi hingga ke hilir. Integrator wajib membangun rumah pemotongan unggas plus *cold storage* dan industri pengolahan seperti diatur Permentan 32/2017. Integrator harus mengintegrasikan seluruh mata rantai nilai dari produksi primer, distribusi, pengolahan, pemrosesan hingga penjualan di pasar dengan pendekatan *from feed to meat*.

Langkah ini selain memperbesar nilai tambah juga jadi solusi *oversupply*. Agar ini berjalan, pemerintah bisa memberikan insentif menarik.

Selama ini, implementasi aturan ini masih *memble* dan penegakan sanksinya juga lemah.

2

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Sepuluh Indonesia | TANGGAL | 20/8/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 12 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembinaan | | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☒ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Potok/Karikatur |

Intensifikasi Kebun Sawit Rakyat

Moratorium perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2018 akan berdampak pada terbatasnya penambahan lahan perkebunan baru beberapa tahun ke depan. Pembatasan pembukaan lahan baru tentu akan berdampak pada keterbatasan penambahan produksi minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia.

Di sisi lain, permintaan CPO global akan terus tumbuh, khususnya permintaan untuk diolah menjadi bahan makanan dan sumber energi. Hal ini seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi dunia. Potensi pertumbuhan permintaan ini harus tetap dapat ditangkap Indonesia.

Idealnya penambahan lahan kebun sawit dilakukan di lahan yang tak digunakan atau terlantar, sehingga tak mengganggu fungsi hutan. Namun kebijakan moratorium lahan melarang segala jenis pengajuan izin baru, termasuk izin penggunaan lahan terlantar karena pemerintah masih memperbaiki tata kelola lahan tersebut.

Oleh karenanya penambahan produksi harus lebih mengandalkan intensifikasi kebun, bukan ekstensifikasi. Salah satu metode intensifikasi yang paling efektif adalah dengan pemajajaan kebun, dimana pohon

tua yang rusak diganti dengan pohon muda menggunakan bibit yang lebih unggul.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah 4,0 ton CPO per hektare (ha). Lebih detail lagi, produktivitas kebun milik swasta mencapai 4,4 juta ton CPO per ha, di sisi lain produktivitas kebun rakyat hanya 3,4 juta ton CPO per ha. Akibatnya, peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi penting dilakukan.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah mengeluarkan program Pemajajaan Sawit Rakyat (PSR). Melalui program ini, para petani rakyat yang memenuhi syarat akan memperoleh dana untuk dapat memajajkan kebun kelapa sawitnya. Harapannya, realisasi pengalangan program ini tercapai masih jauh dari target.

Realisasi pengalangan program PSR pada 2020 hanya 94.000 ha dari target 180.000 ha. Realisasi di 2021 juga masih rendah, hingga 51 Agustus 2021 baru 30.000 ha lahan yang diremajajkan dari target 180.000 ha. Secara total, dari 2016 hingga 51 Agustus 2021 luas lahan yang diremajajkan



Andrian Egius Santoso,
Analisis Industri Bank Mandiri

dengan program ini mencapai 230.500 ha.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penyaluran program ini, mulai dari sosialisasi yang masif hingga pengalangan pengalangan. Akan tetapi mengapa realisasi program ini masih lambat?

Pertama, harga CPO saat ini sedang tinggi. Untuk sawit petani akan kesulitan menjualkan dengan harga yang tinggi ini karena petani melakukan pemajajaan. Apalagi harga yang tinggi ini akan membuat petani akan kesulitan untuk menjualkan hasil panen.

Kedua, stigma yang ditawarkan bahwa petani mampu mendapatkan

menjadi kebutuhan petani. Dana yang disediakan BPDPKS sebesar Rp 30 juta per ha atau hanya setengah dari kebutuhan pemajajaan kebun yang diperkirakan mencapai Rp 60 juta per ha. Petani harus menggunakan tabung sendiri atau mencari sumber dana kebun.

Keseluruhan pohon kelapa sawit baru bisa diproduksi di tahun ketiga atau keempat, sehingga tidak ada cashflow masuk di tiga tahun awal. Petani yang sebelumnya mengandalkan hasil kebun yang akan kehilangan sumber pemasukan selama beberapa tahun. Hal ini yang menjadi penghalang bagi pemerintah untuk dapat membantu. Diperlukan skema kredit khusus untuk dapat ikut mendanai program PSR.

Lantas langkah apa yang dapat diambil? Pertama, pemerintah dapat mendorong perusahaan besar yang memiliki komitmen dengan petani rakyat untuk dapat melakukan proses pemajajaan.

Jika dana di BPDPKS mencukupi, maka perusahaan besar dapat bertindak sebagai akumulator dan pengalangan.

Petani yang sedang diremajajkan lahan, dapat dipelihara sebagai pemanen di kebun perusahaan sendiri, sehingga lahan yang kembali

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☒ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 20/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 12 /
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☐ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☒ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☒ Kontan	☒ Republika		☐ Pojok/Karikatur

menghasilkan. Selain itu, perlu kerjasama dengan berbagai organisasi nirlaba domestik maupun internasional. Organisasi ini biasanya memiliki dana untuk mendukung program PSR dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan perbaikan lingkungan.

Kedua, skema peremajaan dapat divariasikan, misalnya dengan menebang sebagian lahan petani terlebih dulu sehingga mereka masih punya sisa kebun yang menghasilkan. Atau dapat memanfaatkan lahan di sela-sela pohon kelapa sawit untuk ditanami tumbuhan produktif lainnya. Hal ini tentu saja perlu menimbang risiko hama dari penggunaan dua metode tersebut.

Terakhir dan terpenting, manfaat program PSR harus dapat ditingkatkan. Misalnya dengan membundling program PSR dengan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Sehingga petani tidak hanya akan menikmati peningkatan produksi, tetapi juga berproduksi secara berkelanjutan yang akhirnya dapat meningkatkan daya saing produknya. Hal ini juga dapat meningkatkan citra perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan di mata global.

2